

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pemantauan harga bapokting di Kabupaten Kulon Progo dilakukan di 6 pasar pantauan (Sentolo, Wates, Bendungan, Nanggulan, Galur, Temon) setiap hari dan hasilnya diupload pada <https://sikepoku.kulonprogokab.go.id>.

Kondisi terkini harga rata-rata bahan pokok di Kabupaten Kulon Progo per 28 Juni 2024 dibandingkan harga per 1 April 2024:

Komoditas	Harga 1 April 2024	Harga 28 Juni 2024	HET/Harga Acuan	Persentase Perbandingan Harga	Persentase Perbandingan HET/HA
Beras IR1	Rp14.917,-/kg	Rp13.433,-/kg	Rp14.900,-/kg	-10%	-10%
Beras IR2	Rp14.133,-/kg	Rp12.167,-/kg	Rp12.500,-/kg	-14%	-3%
Gula Pasir Curah	Rp17.417,-/kg	Rp17.083,-/kg	Rp17.500,-/kg	-2%	-2%
Gula Kelapa	Rp26.333,-/kg	Rp25.333,-/kg		-4%	
Migor Kemasan Premium	Rp18.750,-/liter	Rp18.500,-/liter		-1%	
Migor Curah	Rp15.250,-/liter	Rp14.875,-/liter	Rp14.000,-/liter	-2%	6%
Migor Minyakita	Rp15.583,-/liter	Rp15.167,-/liter	Rp14.000,-/liter	-3%	8%
Tepung Terigu Segitiga Biru	Rp12.333,-/kg	Rp12.250,-/kg		-1%	
Daging Sapi Has (Kualitas 1)	Rp143.333,-/kg	Rp143.333,-/kg	Rp140.000,-/kg	0%	2%
Daging Sapi Rendang/Semur (Kualitas 2)	Rp135.000,-/kg	Rp135.000,-/kg	Rp130.000,-/kg	0%	4%
Daging Ayam Kampung	Rp70.833,-/kg	Rp70.833,-/kg		0%	

Daging Ayam Ras	Rp37.833,-/kg	Rp35.000,-/kg	Rp40.000,-/kg	-7%	-13%
Ikan Lele	Rp26.167,-/kg	Rp26.333,-/kg		1%	
Ikan Kembung	Rp36.500,-/kg	Rp36.667,-/kg		0%	
Ikan Asin Teri (Teri Gundul)	Rp59.167,-/kg	Rp55.000,-/kg		-7%	
Telur Ayam Kampung	Rp2.583,-/butir	Rp2.583,-/butir		0%	
Telur Ayam Ras	Rp27.333,-/kg	Rp27.667,-/kg	Rp30.000,-/kg	1%	-8%
Kedelai Lokal	Rp13.833,-/kg	Rp14.167,-/kg	Rp11.400,-/kg	2%	24%
Kedelai Impor	Rp12.417,-/kg	Rp12.167,-/kg	Rp12.000,-/kg	-2%	1%
Jagung Pipilan Kering (Kuning)	Rp7.417,-/kg	Rp6.500,-/kg	Rp5.800,-/kg	-12%	12%
Kacang Tanah (Kupas)	Rp30.000,-/kg	Rp28.667,-/kg		-4%	
Kacang Hijau	Rp20.333,-/kg	Rp19.500,-/kg		-4%	
Ketela Pohon	Rp4.833,-/kg	Rp4.667,-/kg		-3%	
Bawang Putih (Kating)	Rp42.333,-/kg	Rp42.500,-/kg		0%	
Bawang Putih (Honan)	Rp37.167,-/kg	Rp37.500,-/kg		1%	
Bawang Merah (Sedang)	Rp30.833,-/kg	Rp36.667,-/kg	Rp41.500,-/kg	19%	-12%
Cabai Merah Keriting	Rp35.667,-/kg	Rp32.500,-/kg	Rp55.000,-/kg	-9%	-41%
Cabai Rawit Merah	Rp32.833,-/kg	Rp30.167,-/kg	Rp57.000,-/kg	-8%	-47%
Cabai Rawit Hijau	Rp41.667,-/kg	Rp45.000,-/kg		8%	

Tomat Sayur	Rp26.333,-/kg	Rp8.000,-/kg		-70%	
Kol/Kobis	Rp8.000,-/kg	Rp9.500,-/kg		19%	
Kelapa	Rp5.333,-/butir	Rp5.167,-/butir		-3%	
Garam Bata 1 kg	Rp10.567,-/kg	Rp10.567,-/kg		0%	
Garam Halus	Rp16.000,-/kg	Rp16.000,-/kg		0%	
Salak	Rp8.333,-/kg	Rp7.833,-/kg		-6%	
Jeruk	Rp19.333,-/kg	Rp18.833,-/kg		-3%	
Mie Instan Indomie Rasa Kari Ayam	Rp2.867,-/bungkus	Rp2.867,-/bungkus		0%	
Susu Bubuk SGM (Balita) 400gr/dos	Rp41.667,-/dos	Rp41.667,-/dos		0%	

Keterangan:

1. HET : Harga Eceran Tertinggi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2024 (HET Beras) dan Permendag 49/2022 (Komoditas Minyak Goreng Curah dan Minyakita)
2. Harga Acuan : Surat Kepala Bapanas No. 425/TS.02.02/B/06/2024 yang menyusuli Harga Acuan sesuai Perka Bapanas 17/2023 dan Perka Bapanas 6/2024

Realisasi LPG 3kg Kab Kulon Progo sampai dengan 30 Juni 2024:

Besaran Kuota LPG tabung 3 kg tahun 2024 Kabupaten/Kota se-DIY untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 19.418 (MT) atau 6.472.660 tabung.

Adapun realisasi penyaluran LPG 3 kg di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Jenis	Kuota	Realisasi s/d 30 Juni 2024	Sisa	Keterangan
Solar Bersubsidi	22.083 kiloliter	10.216 kiloliter	11.867 kiloliter	Persentase pendistribusian 46,26%

Jumlah Agen: 15

Jumlah Pangkalan: 992

Realisasi distribusi solar bersubsidi di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 30 Juni 2024:

Jenis	Kuota	Realisasi s/d 30 Juni 2024	Sisa	Keterangan
Solar Bersubsidi	22.083 kiloliter	10.216 kiloliter	11.867 kiloliter	Persentase pendistribusian 46,26%

Jumlah SPBU JBT SOLAR : 14

Realisasi distribusi pertalite di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 30 Juni 2024:

Kuota pertalite Kab. Kulon Progo tahun 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga 60.117 kiloliter. Adapun realisasi penyaluran pertalite di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Jenis	Kuota	Realisasi s/d 30 Juni 2024	Sisa	Keterangan
Pertalite	60.117 kiloliter	28.752 kiloliter	31.365 kiloliter	Persentase pendistribusian 47,83%

Perkembangan Indeks Perkembangan Harga di Kulon Progo bulan April - Juni 2024.

◦ April Minggu ke:

1. -
2. -
3. -2,3: beras (-1,26), cabai merah (-0,98), cabai rawit (-0,69)
4. -2,3: beras (-1,3969), cabai merah (-0,9548), cabai rawit (-0,643)

◦ Mei Minggu ke:

1. -0.65: daging ayam ras (-1.0295), beras (-0.6868), cabai rawit (-0.1036)
2. -0.64: beras (-0,7312), daging ayam ras (-0.6907), cabai rawit (-0.2659)
3. -0,87: beras (-0,7774), daging ayam ras (-0.3887), cabai rawit (-0.2523)
4. -0,9: beras (-0,7903), daging ayam ras (-0.3552), cabai rawit (-0.2238)

◦ Juni Minggu ke:

1. -0,16: bawang merah (-0,2193), telur ayam ras (-0.1445), minyak goreng (-0.0665)
2. -0,83: bawang merah (-0.3743), daging ayam ras (-0.3387), telur ayam ras (-0.193)
3. -1,03: bawang merah (-0.5029), daging ayam ras (-0.3627), telur ayam ras (-0.2041)
4. -1,55: bawang merah (-0.7189), daging ayam ras (-0.4618), telur ayam ras (-0.2144)

Dampak el-nino sudah mereda sehingga produksi pertanian sudah jauh lebih baik. Tingginya produksi daerah berpengaruh teradap ketersediaan ketersediaan bapokting. Namun demikian, harga cenderung turun sehingga perlu dilakukan peningkatan penyerapan hasil-hasil

pertanian. Kondisi ini terbukti dari IPH di triwulan 2 yang selalu minus. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan tetap melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan melakukan peninjauan kerjasama dengan daerah lain. Diharapkan dengan penyerapan hasil pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan produsen (petani dan peternak) Kulon Progo.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala Komunikasi Efektif Harga Bahan Pokok dan Penting

Masyarakat memerlukan informasi harga bahan pokok dalam rangka merencanakan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pokok sehingga kebutuhan pokok keluarga bisa terpenuhi. Informasi harga bahan pokok juga membantu masyarakat terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok yang sangat berkaitan dengan tingkat daya beli. Informasi ini akan membantu mereka memilih tempat belanja dengan harga terjangkau sehingga mereka bisa memaksimalkan penggunaan uang belanja dengan seoptimal mungkin. Selain itu informasi harga bahan pokok juga membantu meningkatkan pengetahuan umum masyarakat tentang kondisi ekonomi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Hal ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang harga bahan pokok memberikan wawasan yang penting bagi masyarakat dalam membuat keputusan sehari-hari, mengelola keuangan, dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi secara efektif. Fluktuasi harga sudah diimbangi dengan informasi yang cepat dari TPID Kulon Progo melalui informasi perkembangan harga di aplikasi sikepoku yang dapat diakses melalui website. Namun, belum banyak masyarakat yang mengakses aplikasi ini karena masyarakat terutama pedagang kecil belum begitu familiar dengan aplikasi yang disediakan melalui website. Oleh karena itu informasi perkembangan harga perlu disampaikan kepada masyarakat umum melalui siaran radio, TV, atau melalui videotron di tempat – tempat strategis.

Kendala Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pemerintah Daerah perlu melakukan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 7 (tujuh) tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, waktu, tempat, sasaran dan harga yang terjangkau oleh petani. Salah satu upaya Pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah menyediakan pupuk bersubsidi bagi masyarakat petani. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Penyaluran pupuk ditingkat kabupaten masih mengalami beberapa permasalahan dalam penyaluran baik dari sisi sistem maupun penyaluran langsung di lapangan.

Subsidi JBT Solar, JBKP Peralite, dan LPG 3kg Kurang Tepat Sasaran

Pengguna JBT Solar, JBKP Peralite, dan LPG 3kg yang merupakan barang bersubsidi masih dinikmati oleh beberapa orang dan/atau usaha yang bukan merupakan kelompok sasaran subsidi. Subsidi yang tidak tepat dapat menimbulkan kesenjangan daya beli dan meningkatkan disparitas pendapatan.

Kendala Kurang Optimalnya Pendapatan Petani

Perlu dilakukan perlindungan untuk petani agar hasil panen dapat dijual dengan harga terbaik sehingga pendapatan yang didapat lebih optimal. Kendala yang terjadi antara lain turunnya harga produk pertanian pada saat panen raya, dan belum adanya kemampuan untuk melaksanakan tunda jual. Dampak el-nino sudah mereda sehingga produksi pertanian sudah jauh lebih baik. Tingginya produksi daerah memang memastikan ketersediaan bapokting. Namun, harga terus menurun sehingga perlu dilakukan peningkatan penyerapan hasil-hasil pertanian. Kondisi ini terbukti dari IPH di triwulan 2 yang selalu minus. dengan tetap melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan melakukan penjajagan kerjasama dengan daerah lain. Diharapkan dengan penyerapan hasil pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan produsen (petani dan peternak) Kulon Progo.

Lemahnya Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat masih kurang sehingga jika terjadi inflasi sangat berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat. Masyarakat Kulon Progo juga masih banyak yang mengalami *stunting*. Masyarakat yang kurang sehat dapat berdampak pada turunnya produktivitas dan mutu sumber daya manusia. Dengan adanya pemberian bantuan pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan permasalahan *stunting* dapat teratasi. Masyarakat juga memerlukan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas agar daya beli meningkat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah TPID Untuk Komunikasi Efektif Harga Bahan Pokok dan Penting

- Pemantauan harga bapokting pada 6 pasar pantauan (Sentolo, Wates, Bendungan, Nanggulan, Galur, Temon) setiap hari, hasilnya dipublikasikan ke masyarakat melalui penyajian informasi perkembangan harga kebutuhan pokok setiap hari pada aplikasi SikepoKu dan SP2KP.
- TPID Kulon Progo telah melaksanakan Koordinasi TPID dan Rakor Forkopimda.
- Koordinasi dengan OPD terkait/Pihak terkait mengenai ketersediaan barang pokok dilakukan dengan Dinas Perindag Propinsi DIY, Bulog dan distributor dari DIY.
- Pemantauan Ketersediaan dan Kesehatan Hewan Qurban Menjelang Idul Adha tanggal 29 Mei 2024
- TPID menghadiri bersama Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diadakan Kementerian Dalam Negeri setiap Senin di command room Dinas Komunikasi dan Informatika.

Langkah TPID Untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida adalah Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pestisida. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pengawasan dan percepatan distribusi pupuk yang menghasilkan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan HET dan perubahan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kab. Kulon Progo tahun anggaran 2024. SK tersebut menyesuaikan kuota pupuk bersubsidi dengan RDKK.

Langkah TPID Untuk Subsidi JBT Solar, JBKP Peralite dan LPG 3kg Tepat Sasaran

- Koordinasi untuk barang penting terkait realisasi BBM untuk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan SDA bersama dengan Pertamina melalui komunikasi langsung.
- Melakukan Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Kemetrologian dan Bagian Perekonomian dan SDA terkait pengujian berat Gas LPG 3 Kg di wilayah Samigaluh.

Langkah TPID Untuk Optimalkan Pendapatan Petani

- Proses rekrutmen fasilitator sudah selesai, sosialisasi tingkat kabupaten, pembukaan rekening kelompok, sosialisasi tingkat kelompok tani, Gambar, RAB, Kontrak Swakelola untuk pembangunan jaringan irigasi air tanah dangkal (Juni-Oktober, 120 hari).
- Proses Rekrutmen Fasilitator sudah selesai, sosialisasi tingkat kabupaten, pembukaan rekening kelompok, sosialisasi tingkat kelompok tani, Gambar, RAB, Kontrak Swakelola pembangunan Dam Parit (Juni-Oktober, 120 hari).
- Kegiatan Revitalisasi RMU dan Sarana Pendukungnya 1 paket untuk Gapoktan Ngesti Raharjo, Ngestiharjo, Wates, Kulon Progo. Pembangunan bangunan dryer dan revitalisasi rumah produksi beras dalam tahap 30%, sedang pengadaan barang dalam tahap waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Proses pengadaan Alat Uji Pangan meliputi: Rapid Test Pestisida, Test Kit Boraks, Test Kit Rhodamin, Test Kit Formalin untuk pengujian pangan segar asal tumbuhan sejumlah 100 sampel
- Fasilitasi pemanfaatan pekarangan berupa rumah bibit, polybag, benih sayur, bibit buah-buahan, pupuk organik, ayam kampung, jaring, irigasi tetes, tenda pasar tani dan kelengkapannya. Saat ini dalam proses pengadaan.
- Jasa Konsultansi Perencanaan rekayasa dan Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi. Kontrak sudah dilaksanakan dan saat ini pekerjaan fisik sudah dimulai dengan capaian fisik sebesar 38%. Upaya percepatan fisik dan keuangan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi setiap bulan.
- Pelaksanaan pekerjaan Ruas Jangkaran-Pantai Congot (capaian fisik sebesar 32%).
- Jasa Konsultansi Pengawasan Rekonstruksi Jalan Tahun 2024 Paket 1 dan Paket 2 sudah terlaksana. Kontrak sudah dilaksanakan dan saat ini pekerjaan sudah dimulai dengan capaian fisik sebesar 44%. Upaya percepatan fisik dan keuangan dilakukan dengan Monitoring dan evaluasi setiap bulan.
- Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2024 sudah terlaksana. Pengadaan Barang/jasa dan Kontrak sudah dilaksanakan dan saat ini pekerjaan fisik sudah dimulai dengan capaian fisik sebesar 40%. Monitoring dan evaluasi setiap Bulan.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Kulon Progo Paket 1 dan paket 2 sudah terlaksana. Saat ini pekerjaan sudah dimulai dengan capaian fisik sebesar 44%.

Monitoring dan evaluasi setiap Bulan.

- Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Jembatan Ngerung Petruk sudah terlaksana. Kontrak sudah dilaksanakan dan saat ini pekerjaan sudah dimulai dengan capaian fisik sebesar 25%. Monitoring dan evaluasi setiap Bulan.
- Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jembatan dan Jasa Konsultansi Survei Kondisi Jalan. Waktu Pelaksanaan Januari sd Desember 2024. Sudah dilaksanakan rapat koordinasi dan Pembentukan Tim Teknis. Penyusunan HPS dan KAK Konsultan sudah dilaksanakan.
- Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kulon Progo paket 1 dan 2. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Kulon Progo Paket 1 dan paket 3. Kontrak sudah dilaksanakan dan saat ini pekerjaan sudah dimulai dengan capaian fisik sebesar 44%.
- Angkat gulma enceng Gondok & Babat Rumput Hulu Bendung Gerak Drainase Peni sudah terlaksana.
- Pembersihan drainase, pembangunan/peningkatan 5 daerah irigasi dan peningkatan saluran drainase 7 lokasi. Kontrak sudah dilaksanakan dan saat ini pekerjaan sudah dimulai dengan capaian fisik sebesar 42,01%.
- Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi, melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi 14 lokasi, melaksanakan penyusunan perbup pola dan tata tanam. Kontrak sudah dilaksanakan dan saat ini pekerjaan sudah dimulai dengan capaian fisik sebesar 61%.

Langkah TPID Untuk Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

- Pada Bulan Maret dan April dilaksanakan Operasi Pasar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Adapun komoditas yang dijual meliputi beras premium, telur, gula pasir dan minyak goreng.
- Pemantauan Operasi Pasar di Pasar Wates (sebagai Pasar Pantauan SP2KP) dengan pasokan total komoditi (gula pasir dan minyak goreng) sebanyak 4 ton pada tanggal 20 Juni 2024.
- Pemantauan Pasar Murah DIY di Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan pada tanggal 27 Juni 2024.
- Proses perencanaan Rehabilitasi Pasar Wates, Rehabilitasi pasar Jombakan, Rehabilitasi Pasar Pripih dan Rehabilitasi Pasar Kasihan telah selesai dilaksanakan. Untuk pembayaran jasa konsultansi perencanaan setelah mendapatkan penyedia fisik. Selanjutnya dilaksanakan pengadaan melalui pengadaan langsung yang dijadwalkan kontraknya pada awal bulan Juli 2024, antara lain: 1) paket rehabilitasi pasar pripih, 2) jasa konsultansi pengawasan rehabilitasi pasar pripih, 3) paket rehabilitasi pasar kasihan, 4) jasa konsultansi pengawasan rehabilitasi pasar kasihan Sedangkan untuk paket jasa konsultansi pengawasan rehabilitasi pasar wates dilakukan dengan metode tender, Kemudian, untuk dokumen perencanaan rehabilitasi pasar wates sudah disampaikan ke BPBJ dan dimintakan review ke Inspektorat Daerah.
- Proses survey harga, penyusunan KAK dan penentuan HPS bantuan sarana dan prasarana untuk poklhasr.
- Fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada 4 KWT dan Fasilitasi pengembangan agroeduwisata di KWT Lestari Mulya, Ngentak, Ngestiharjo, Wates.
- Realisasi penyaluran BLT Kalurahan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.3.085.200.000 (50% dari target 1 tahun)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Sembako APBN dan APBD dalam tahap penyusunan regulasi, Rapat Koordinasi dan Perjanjian Kerja Sama dengan OPD Mitra dan Bank

Penyalur

- Mengalokasikan Subsidi Bunga Pinjaman kepada pelaku usaha mikro melalui Perumda Bank Kulon Progo dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp713.702.250 dengan 776 debitur
- Perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan padat karya infrastruktur khususnya infrastruktur sederhana. Sasaran: Masyarakat Penganggur, Setengah Penganggur dan Masyarakat Miskin. Dari 40 lokasi yang sudah di transfer 23 lokasi sudah selesai pekerjaan Padat Karya nya dan saat ini dalam proses penyusunan laporan, yang 17 lokasi saat ini masih dalam proses pekerjaan. Dinas juga sudah melaksanakan monitoring ke lokasi Padat Karya.
- Subsidi angkutan / bus sekolah Januari sd Desember 2024.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pelaksanaan alokasi dan distribusi pupuk berjalan dengan baik sesuai SK Bupati.
- Rencana Kerjasama Antar Daerah dengan Kota Yogyakarta dan Kota Palembang untuk pengendalian inflasi di daerah.
- Mengalokasikan anggaran untuk cetak sawah baru agar meningkatkan ketahanan pangan daerah. Cetak sawah juga dilakukan bersama Kepolisian Resor Kulon Progo.
- Bantuan Pangan Non-Tunai APBD melalui e-warong yang memberdayakan masyarakat dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa secara rutin efektif meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
- Mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar untuk menghadapi gejolak kenaikan harga menjelang HBKN.
- Kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan telah terlaksana dengan baik melalui operasi pasar, pasar murah dan pemantauan harga agar harga di tingkat konsumen tetap wajar sesuai mekanisme pasar.
- Program SPHP perlu terus dikoordinasikan dengan BULOG ketika muncul kebutuhan beras dan jagung di masyarakat.
- Kelancaran distribusi terlaksana melalui pembangunan jalan-jalan sebagai infrastruktur distribusi barang, forum komunikasi, kerjasama antar daerah GNPIP DIY, dan penyampaian hasil pemantauan harga melalui website sikepoku.go.id. Penyampaian hasil pemantauan harga rutin dan terus dilakukan.
- Pemantauan harga terkhusus menjelang HBKN berkoordinasi dengan TPID DIY terus dilakukan.
- Pembangunan fasilitas jalan dan irigasi pertanian terus dilakukan untuk memperlancar produksi pertanian.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pemerintah Kabupaten bisa mengusulkan pengadaan *cold storage* melalui anggaran Dana Alokasi Khusus tahun berikutnya.
- Penyerapan hasil pertanian Kulon Progo perlu ditingkatkan agar pada masa panen harga tetap stabil dan tidak merugikan petani.
- Bulan waspada cabai merah besar di Indonesia terjadi pada bulan Juli-Agustus, untuk kebutuhan luar daerah dapat dibantu champion cabai atas nama Sukarman (081328727505) dari Panjatan, Kulon Progo. Kontak dinas melalui Agus (087777269905).

K/L terkait melakukan pengawasan terkait kelancaran pendistribusian minyak goreng dari pihak produsen dan distributor ke retail modern dan pasar tradisional antisipasi adanya produsen yang menjual dengan metode bundling. Seiring dengan kenaikan HET, perlu diperhatikan terkait pemerataan/ketersediaan stok minyak di tiap provinsi.

- Untuk mendukung realisasi pupuk bersubsidi, Satgas Pangan Polri dan K/L terkait diharap mengintensifkan monitoring dan pengawasan (represif untuk preventif guna menjaga ketersediaan) terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan stok di tiap-tiap wilayah untuk mempermudah para petani guna mendapatkan pupuk bersubsidi dan perlunya penambahan titik distribusi, khususnya wilayah-wilayah yang jauh dari petani.
- K/L terkait terus melakukan evaluasi terkait regulasi pangan agar lebih efektif dan tepat sasaran yang bertujuan memberikan perlindungan baik bagi petani maupun konsumen akhir.
- Terus mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai langkah penguatan ekonomi melalui Usaha Mikro Kecil Menengah di Kulon Progo. Saat ini OPD yang mendampingi UMKM telah melakukan berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi UMKM dari segala sektor, baik Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan Perikanan, dan lain-lain.
- Meningkatkan terus semangat "Bela Beli Kulon Progo" agar ekonomi daerah bertumbuh secara merata. Salah satunya melalui aplikasi belabeliku.
- Perlunya meningkatkan koordinasi untuk pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di daerah agar tetap memenuhi prinsip 7 (tujuh) tepat.
- Penggunaan kartu tani dapat dioptimalkan, apabila ditemukan adanya permasalahan maka petani dapat dengan mudah untuk mengurusnya. Perlu mengoptimalkan penebusan pupuk secara manual, agar petani yang belum mendapatkan kartu tani dapat tetap menebus jatah pupuknya.
- Perlunya untuk lebih mencermati RDKK dan memastikan agar semua petani yang masuk dalam anggota kelompok tani sudah terdaftar pada RDKK, dan juga terdaftar dalam SIMLUHTAN agar dapat membeli pupuk bersubsidi.